

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Perkembangan revolusi industri saat ini telah mendorong organisasi di berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan seperti perbankan, untuk melakukan Transformasi Digital (TD) guna tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Saat ini situasi berubah menjadi situasi yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, maka TD merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari (Hadiono dkk., 2020). Implementasi TD dapat membantu organisasi memperkenalkan model bisnis baru yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan aspek operasional, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan inovatif (Viamianni dkk., 2023). Mengingat ketergantungan pelaksanaan TD pada penggunaan teknologi yang tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai TD dan keamanan informasi sangat perlu diperhatikan. Keamanan informasi adalah upaya untuk menjamin dan memastikan terhadap segala ancaman terhadap fasilitas, data, informasi akibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab (Andyas, 2023).

Pada penelitian (Mulyana dkk., 2021) tinjauan literatur sistematis mengidentifikasi 28 mekanisme tata kelola TI yang mempengaruhi TD, Integrasi mekanisme ini dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) penting untuk mendukung TD sambil memastikan keamanan dan kepatuhan data. SMKI tradisional tetap krusial untuk memastikan keamanan informasi dan kepatuhan, terutama dalam penerapan SMKI yang mendukung TD dan melindungi aset digital (Mulyana dkk., 2022). Hasil survei menunjukkan pentingnya mekanisme TKTI hibrida, baik tradisional maupun *agile*, untuk TD dan pencapaian kinerja organisasi, terutama dalam konteks SMKI, untuk memastikan keamanan dan kepatuhan data (Mulyana dkk., 2023). Penelitian (Mulyana dkk., 2024a) pada studi kasus BRI yang membahas bagaimana dimensi transformasi digital berdampak pada kinerja organisasi dengan mengimplementasikan mekanisme TKTI *ambidextrous* sebagai kunci yang mempengaruhi transformasi digital dan kinerja organisasi. Dilanjutkan pada penelitian selanjutnya menjelaskan TD terbukti berdampak besar pada kinerja organisasi, menunjukkan bahwa TKTI

yang efektif adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam era digital pada konteks perbankan (Mulyana dkk., 2024b). termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berada dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat BPR menghadapi digitalisasi, persaingan ketat, serta perubahan perilaku pelanggan, penting bagi mereka untuk menerapkan SMKI untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikelola selama proses transformasi tetap aman dan terjaga integritasnya.

Menurut (POJK 7, 2024) BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung. BPR merupakan organisasi skala UMKM karena jauh lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum karena BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan giro, melakukan transaksi valuta asing, atau menawarkan produk asuransi (POJK No. 20 Tahun 2014). Dalam penelitian (Shabri dkk., 2020) bank harus mampu mengikuti laju perkembangan teknologi dalam menyediakan layanan berbasis digital. Keharusan ini semakin diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerbitan POJK No. 75/POJK.03/2016 dan SEOJK No.15/SEOJK.03/2017, yang mewajibkan BPR untuk mengadopsi digitalisasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan (POJK No. 75 Tahun 2016). Perubahan ini memungkinkan BPR untuk meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi ekspektasi pelanggan akan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses, serta menjaga keamanan data nasabah dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat, salah satunya adalah menerapkan standar ISO 27001:2022.

Lembaga kecil dan menengah seperti BPR dapat dikategorisasikan berada dalam skala UMKM, seperti yang dijelaskan pada (Moeti, 2022) Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. UMKM memainkan peran kunci dalam ekonomi, karena mereka mewakili sebagian besar kekayaan yang dihasilkan di seluruh dunia (Nistotskaya dkk., 2014). SMKI dapat digunakan pada sektor perbankan untuk mengembangkan kebijakan keamanan dan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis mereka. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan perlindungan terhadap ancaman siber dan memastikan kelangsungan bisnis mereka di era digital.

ISO/IEC 27001:2022 adalah standar global yang menguraikan pedoman untuk mengelola keamanan informasi di perusahaan. Spesifikasi ini memungkinkan organisasi dalam bentuk apa pun untuk melindungi keamanan berbagai jenis data, termasuk informasi karyawan, catatan keuangan, kekayaan intelektual, dan data yang dibagikan dengan entitas pihak ketiga (Dimitri, 2023). ISO 27001:2022 merupakan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Internasional yang diakui secara global. ISO 27001:2022 ini berfokus pada pendekatan berbasis risiko. Perusahaan/organisasi berarti dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis. Dalam penelitian ini penerapan yang digunakan untuk manajemen keamanan informasi pada BPRDCO adalah ISO 27001:2022.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Pada latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut:

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana rekomendasi solusi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup klausul ISO 27001:2022 prioritas untuk transformasi digital UMKM?
- b. Bagaimana perancangan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan klausul ISO 27001:2022 prioritas untuk transformasi digital UMKM?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk

- a. Menganalisis dan merancang sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO 27001:2022 untuk BPR dengan mempertimbangkan aspek *people*, *process*, dan *technology* yang berlaku.
- b. Mengevaluasi pengaruh perancangan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001:2022 terhadap kesiapan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi pada BPR.

#### **I.4 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai Tugas Akhir penulis yang hanya berfokus pada beberapa hal. Batasan masalah tersebut meliputi:

- a. Penelitian ini membahas studi kasus yang terdapat pada sebuah perusahaan BPRDCo, sehingga praktik pengelolaan yang ditentukan akan dipengaruhi oleh kebijakan, regulasi budaya, dan karakteristik industri dari organisasi tersebut.
- b. Penelitian ini berfokus pada ISO 27001:2022 yang digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk melakukan evaluasi keamanan informasi pada Perusahaan BPRDCo. Semua elemen keamanan data yang diteliti akan dievaluasi dan dibandingkan dengan persyaratan ISO 27001:2022.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dalam penelitian tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Peningkatan basis pengetahuan penelitian dalam menggunakan standar internasional ISO 27001:2022 area fokus SME untuk transformasi digital UMKM.
2. Pemanfaatan implikasi praktis hasil penelitian sistem manajemen keamanan informasi untuk transformasi digital UMKM di BPRDCo serta organisasi sejenis lainnya.
3. Bagi BPRDCo dan referensi untuk organisasi sejenis dapat mengambil manfaat dari hasilnya guna meningkatkan keamanan informasi mereka sesuai dengan standar ISO 27001:2022.